

**AKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN PADA OTONOMI
DAERAH DI KECAMATAN TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Oleh
AGUS WINANTO



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2019

**AKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN PADA OTONOMI
DAERAH DI KECAMATAN TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu sangat berharga.

*Dengan Rahmat Allah S.W.T, Skripsi ini
kupersembahkan untuk;*

- ❖ *Bapak Wintoro dan Ibu Martini tercinta yang senantiasa mendoakan, menyayangiku, atas semua pengorbanan dengan penuh keikhilasan, dan tak pernah lelah memberikan nasihat, ananda menghaturkan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tiada terhingga.*
- ❖ *Sahabat-sahabat terluar biasaku yulan, Yurwa, yusi, cacak, ganes, jamal, erix, achmad dan seluruh anak-anak GOAC 2015*
- ❖ *Teman seperjuangan Agribisnis 2015, terimakasih atas solidaritas yang luar biasa ini, sehingga membuat hari-hari semasa kuliah menjadi berarti.*
- ❖ *Almamaterku.*

RINGKASAN

AGUS WINANTO, “Aktivitas Penyuluhan Pertanian Di Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”. (Dibimbing oleh **KHAIDIR SOBRI DAN RAFAEH ABUBAKAR**).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Aktivitas Penyuluhan Pertanian Di Otonomi Daerah dan Manfaat Aktivitas Penyuluhan Pertanian Bagi Petani di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), untuk metode penarikan contoh digunakan metode *purposive sampling* dan *random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada responden yang telah ditentukan dengan menggunakan alat bantu qoesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyuluhan pada tahun 2018 di Kecamatan Tugumulyo telah berjalan dengan baik dan lancar serta pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian telah sesuai dengan pedoman yang ada. Dan manfaat yang di dapat petani dari adanya aktivitas penyuluhan tersebut yaitu menambah ilmu pengetahuan bagi petani, dapat mengendalikan hama-penyakit dengan tepat, mendapatkan bantuan berupa Saprodi dan Alsintan dan meningkatkan produksi serta tingkat adopsi teknologi yang semakin baik.

SUMMARY

AGUS WINANTO, " Agricultural Counseling Activities in Regional Autonomy in the District of Tugumulyo, Musi Rawas Regency". (Supervised by **KHAIDIR SOBRI AND RAFEAH ABUBAKAR**).

This study aims to determine the Agricultural Extension Activities in Regional Autonomy And The Benefits Of Agricultural Extension Activities For Farmers In Tugumulyo District, Musi Rawas District. This research was carried out in Tugumulyo sub-district, Musi Rawas regency in May 2019 until July 2019. The research method used was a case study. The sampling method used was purposive sampling and random sampling methods. The data collection methods used in this study are in-depth interviews with respondents who have been determined using questioner tools that have been prepared previously. Data processing and analysis is done using descriptive-qualitative methods.

The results of the study showed that the implementation of the extension program in 2018 in the subdistrict of tugumulyo had run well and smoothly and the implementation of agricultural extension conducted by agricultural extension workers was in accordance with existing guidelines. And the benefits that can be obtained by farmers from the extension activities are increasing knowledge for farmers, being able to control pests correctly, getting assistance in the form of Saprodi and Alsintan and increasing production and the level of technology adoption that is getting better.

**AKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN PADA OTONOMI
DAERAH DI KECAMATAN TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**oleh
AGUS WINANTO**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian**

**pada
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2019

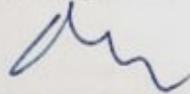
HALAMAN PENGESAHAN

**AKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN PADA OTONOMI
DAERAH DI KECAMATAN TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Oleh
AGUS WINANTO
412015095

Telah dipertahankan pada ujian 27 Agustus 2019

Pembimbing Utama



Ir. Khaidir Sobri, M.P

Pembimbing Pendamping



Ir. Rafeah Abubakar, M.Si

Palembang, 10 September 2019

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Palembang

Dekan,



Dr. Ir. Gusmiatun, M.P

NIDN/NBM. 0016086901/72723

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, :

Nama : Agus Winanto
Tempat/ tanggal lahir : BSC / 21 September 1997
NIM : 412015095
Pogram studi : Agribisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam Karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 21 Agustus 2019



(Agus Winanto)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aktivitas Penyuluhan Pertanian Pada Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Ir. Khaidir Sobri, M.P** dan Ibu **Ir. Rafeah Abubakar, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang menunjang dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu memberikan saran dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

RIWAYAT HIDUP

AGUS WINANTO, dilahirkan di BSC pada tanggal 21 September 1997 merupakan putra kedua dari dua bersaudara dari ayahanda Wintoro dan Ibunda Martini.

Penulis menyelesaikan Sekolah dasar di SD Bina Ilmu Musi Rawas 2009, Sekolah Menengah Pertama 2012 di SMP Bina Ilmu Musi Rawas, dan Sekolah Mengengah Atas tahun 2015 di SMA Negeri Tugumulyo Musi Rawas.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang Program Studi Agribisnis. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata Tematik Posdaya (KKN POSDAYA) angkatan L pada tahun 2018/2019, di Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati.

Pada bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2019 penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dengan judul “Aktifitas Penyuluhan Pertanian Di Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
BAB II. KERANGKA TEORITIS.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Sejenis	8
B. Tinjauan pustaka.....	12
1. Konsepsi Otonomi Daerah	12
2. Konsepsi Penyuluhan Pertanian.....	14
3. Konsepsi Penyuluhan Pertanian.....	25
4. Konsepsi Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pada Otonomi Daerah.....	28
5. Konsepsi Kelompok Tani.....	36
6. Konsepsi Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian.....	39
C. Model Pendekatan	41
D. Batasan Penelitian dan Operasionalisasi Variabel	42
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Tempat dan Waktu	44
B. Metode Penelitian.....	44
C. Metode Penarikan Contoh.....	45
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	47
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Keadaan Umum.....	49
1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi.....	49
2. Keadaan Topografi.....	49
3. Pemerintahan.....	50
4. Jumlah Penduduk	50
5. Prasarana	51

B.	Identitas Responden.....	52
1.	Identitas Supervisi Teknis.....	52
2.	Identitas Penyuluhan Pertanian.....	53
3.	Identitas Kelompok Tani.....	54
C.	Kegiatan Umum Aktivitas Penyuluhan Pada Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo	55
D.	Rencana Program Penyuluhan Pertanian Pada Tahun 2018 Di Kecamatan Tugumulyo	56
E.	Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian Pada Tahun 2018 Di Kecamatan Tugumulyo	59
1.	Hasil	59
2.	Pembahasan.....	65
F.	Manfaat Aktivitas Penyuluhan Pertanian Bagi Petani Sebagai Anggota Kelompok Tani Di Kecamatan Tugumulyo	66
1.	Hasil	66
2.	Pembahasan.....	68
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu yang Sejenis	10
2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, 2017.....	50
3. Jumlah Penduduk Kecamatan Tugumulyo, 2018.....	50
4. Prasarana Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas 2018.....	51
5. Nama-nama Penyuluh, Pendidikan Terakhir, Status, dan Daerah Binaan.....	53
6. Jumlah Petani Contoh Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.....	54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Diagramatik Aktivitas Penyuluhan Pertanian Pada Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas	41
2. Profil Supervisi Teknis dan Penyuluh Pertanian di Kecamatan Tugumulyo.....	75
3. Peta wilayah Kecamatan Tugumulyo.....	120
4. Surat Keterangan Dari Kecamatan Tugumulyo.....	121
5. Surat Keterangan Dari BPP Kecamatan Tugumulyo.....	122
6. Dokumentasi.....	123

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Profil Penyuluh Pertanian.	75
2. Hasil Wawancara Dengan Penyuluh Pertanian.....	86
3. Hasil Wawancara Dengan Petani Responden	95
4. Jumlah Petani Yang Menerima Program Dan Yang Tidak Menerima Program.....	118
5. Lokasi Kecamatan Tugumulyo	120
6. Surat Keterangan Dari Kecamatan Tugumulyo	121
7. Surat Keterangan Dari BPP Kecamatan Tugumulyo	122
8. Dokumentasi	123

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan ekonomi, transportasi, peretanian, sarana dan prasarana yang disepakati bersama.

Pembangunan pertanian masih tetap menjadi fokus utama di dalam RPJPN, karena menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara karena sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan pertanian menjadi penting karena kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam bentuk kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi dan kontribusi devisa (Blank, 2003). Namun dalam perkembangannya, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi semakin pasif dan lebih bersifat penunjang semata. Memburuknya kinerja sektor pertanian di negara-negara berkembang dipercaya karena terabaikannya sektor tersebut dalam perumusan prioritas pembangunan dari para pemimpinnya (Todaro dan Smith, 2006).

Hal ini sejalan dengan (Wibowo, 2016), bahwa pembangunan pertanian menghadapi tantangan berat untuk mampu bersaing, hal ini disebabkan mayoritas usahatani dikelola oleh petani berlahan sempit, bermodal kecil, dengan pendidikan

yang relative rendah. Kebijakan pembangunan pertanian yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat terutama di pedesaan harus dimulai dari perbaikan sumber-sumber pokok kemajuan pertanian (Todaro dan Smith, 2006). Dimana saat ini pembangunan pertanian di Indonesia telah memasuki masa reformasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah menjadi kosakata baru bagi sebagian besar penduduk Indonesia setelah pemerintah mengundangkan dua undang-undang (UU) pada tahun 1999 yaitu Undang-undang Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut direvisi pada tahun 2004 dengan tidak mengubah nama, yakni Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini menjanjikan pendelegasian wewenang yang lebih besar bagi daerah, terutama daerah kabupaten atau kota. Tujuan idealnya, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional dan transparan, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan partisipasi serta mengurangi kesenjangan antar daerah (Simanjuntak, 2010).

Namun, peraturan yang ada membuat para penyuluh kebingungan dalam melaksanakan perannya, bahkan penyuluhan pertanian dipandang tidak berfungsi seperti seharusnya. Tahun 2006, revitalisasi penyuluhan pertanian telah dikumandangkan kembali, kelembagaan penyuluh di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dihidupkan kembali, yang dituangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (SP3K), kelembagaan di Kabupaten berupa Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapelluh) dan di Kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). Dengan adanya revitalisasi penyuluhan besar harapan bahwa penyuluhan tidak lagi sekedar proses alih teknologi, namun lebih kepada tercapainya kemandirian petani, serta kelembagaan penyuluhan yang tertata dengan baik dan terorganisasi (Margono, 2015).

Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefesienkan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka secara tidak langsung akan membawa perubahan pada sistem kerja pemerintah daerah, dari pimpinan tingkat tertinggi di daerah sampai dengan kepala desa. Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Namun, dengan hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengancam eksistensi penyuluhan, karena tidak mengakomodasi secara jelas keberadaan kelembagaan penyuluhan di daerah, dan timbul kekhawatiran bahwa penyuluhan tidak lagi mengikuti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Sebagian pihak memaknai negatif Undang-Undang ini, namun sebagian pihak melihat sesungguhnya inilah kesempatan untuk memperkuat keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian daerah. Secara yuridis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 akan memperkuat keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian, karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Dengan kata lain, kebijakan ini pada hakekatnya sejalan dan harmonis satu sama lain (Bahua, 2016).

Menurut Bahua (2016), ciri khas perkembangan penyuluhan pada masa reformasi (Otonomi Daerah) adalah peningkatan profesionalisme penyuluh melalui perbaikan kinerja penyuluh dalam menyebarluaskan informasi inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini berdampak pada pembangunan, dimana pembangunan daerah bertumpu pada kemampuan sendiri untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut diperoleh dari

berbagai sumber seperti pajak, restribusi dan lain-lain. Di banyak daerah, pertanian masih menjadi *primer mover* untuk meningkatkan produktifitas usahatani dan pendapatan masyarakat.

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal) bagi petani dan keluarganya agar berubah sikap dan perilakunya untuk bertani lebih baik (*better farming*), berusaha lebih baik (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*) dan bermasyarakat lebih baik (*better community*) serta menjaga kelestarian lingkungannya (*better environment*) (Departemen pertanian, 2009). Sejalan dengan Subagio (2010), penyuluhan pertanian adalah jasa layanan dan informasi agribisnis yang dilakukan melalui proses pendidikan non formal untuk petani dan pihak-pihak terkait yang memerlukan, agar kemampuan dan skilnya dapat berkembang secara dinamis untuk menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang dihadapinya dengan baik, menguntungkan dan memuaskan. Kegiatan penyuluhan adalah jasa layanan dan jasa layanan itulah yang harus dibuat bermutu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan sasaran penyuluhan pada waktu yang diperlukan. Mutu jasa layanan dapat dilihat dari segi keterpercayaan (*reatibility*), keterjaminan (*assurance*), penampilan (*tangiability*), kepemerhatian (*empaty*), dan ketanggapan (*responsiveness*). Jasa layanan itu dilakukan melalui proses pendidikan non formal guna meningkatkan kesadaran para pelaku sistem agribisnis (sasaran) yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media cetak dan elektronik.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menjelaskan bahwa sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan baik pengetahuan, sikap, serta keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Pelaku utama merupakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya. Sedangkan pelaku usaha adalah perorangan warga Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan petani, maka arah kebijakan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan melalui pematapan sistem penyuluh pertanian yang terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan petani dan pelaku usaha yang berkarakter, memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri dan berdaya saing mendukung bioindustri dan berkelanjutan. Sistem Kerja Latihan Kunjungan Dan Supervisi (LAKU SUSI) sebagai bagian dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian, merupakan pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh pertanian dan di tindak lanjuti dengan kunjungan dengan berupa pendampingan kepada petani/kelembaga petani secara terjadwal serta di dukung dengan supervisi teknis dari penyuluh pertanian senior, dan ketersediaan informasi teknologi sebagai pemateri kunjungan.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian tentunya tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya program dan rencana kerja penyuluhan pertanian. Program kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan. Selanjutnya program penyuluhan pertanian adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan, yang disusun dalam bentuk yang sistematis dan teratur (Mardikanto dan Sutarni, 1993). Sedangkan rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Nafarin, 2009). Selanjutnya rencana kerja penyuluh pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat, yang menentukan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berinteraksi dengan petani (Badan Koordinasi Penyuluh dalam Asrianti, 2016). Sehingga perlu dilakukan evaluasi dari kegiatan penyuluhan pertanian di era reformasi (otonomi daerah) saat ini.

Kecamatan Tugumulyo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tepatnya berada di Kabupaten Musi Rawas dengan jarak ke Ibu Kota Kabupaten \pm 17 km. Kecamatan Tugumulyo dikatakan

sebagai salah satu lumbung padi bagi Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Kecamatan Tugumulyo lebih difokuskan dalam bidang pertanian. Sehingga pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengarahkan agar penyuluhan pertanian lebih berfokus pada Kecamatan Tugumulyo. Berdasarkan hasil pra survei yang telah dilakukan peneliti di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tugumulyo, bahwa Kecamatan Tugumulyo sendiri terdiri dari 18 desa yang dibina oleh 18 penyuluh pertanian, hal ini sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 2006 dimana dalam satu desa terdapat satu penyuluh pertanian. Di Kecamatan Tugumulyo terdapat kelompok tani sebanyak 171 kelompok dan memiliki anggota kelompok tani sebanyak 4275 orang dimana satu desa paling sedikit terdapat 8 kelompok tani dan yang terbanyak berjumlah 16 kelompok tani yang di bina oleh satu penyuluh pertanian. Satu kelompok tani berjumlah antara 20-25 orang anggota.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tugumulyo telah melaksanakan mandat yang terkandung di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perubahan pengelolaan pembangunan pertanian dari sentralisasi *top down* menjadi desentralisasi *bottom up*. BPP Kecamatan Tugumulyo dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan program penyuluhan pertanian berupa materi penyuluhan pertanian yang mencakup sektor tanaman pangan dan hortikultura kepada penyuluh pertanian yang tentunya akan disampaikan pada petani. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah program penyuluhan pertanian sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Aktifitas Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pada Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu :

1. Apakah pelaksanaan penyuluhan pertanian pada otonomi daerah di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan program yang direncanakan ?
2. Apa manfaat aktivitas penyuluhan pertanian bagi petani sebagai anggota kelompok tani di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aktivitas penyuluhan pertanian pada otonomi daerah di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
2. Untuk mengetahui manfaat aktivitas penyuluhan pertanian bagi petani di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan.
3. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang mengadakan penelitian dengan topik yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D. A. 2001. *Penyuluhan Pertanian. Yasaguna Pengembangan Sinar Tani*. Jakarta.
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anang, R. 2014. *Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 32 tahun 2004 (Studi Kasus Dikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan)*. Disertasi Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (Tidak Dipublikasikan).
- Arifin, Bustanul. 2005. *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. PT Grasindo. Jakarta.
- Bahua, Mohammad Iqbal. 2016. *Kinerja Penyuluh Pertanian*. Deepublish. Yogyakarta, Indonesia.
- Blank, R. M. 2003. *Selecting Among Anti-Proverty Policies: Can an Economist be Both Critical and Caring? Review of Social Economy*, 78(4), 466-469.
- Daniel, Moehar. 2003. *Metode Penelitian sosial Ekonomi*. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia, Bandung, Indonesia.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2005. *Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian*: Jakarta.
- _____. 2007. *Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani*. (<http://kelembagaandas.wordpress.com> diakses pada 20 Maret 2019).
- _____. 2009. *Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Modul Pembekalan THL TB Penyuluh Pertanian*.
- Gunawan, I. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Kartasapoerta. 1991. *Pengembangan Usaha Tani*. Rajawali Penindo. Jakarta.
- _____. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bina Aksara, Jakarta, Indonesia.

- Kerlinger. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behaviour*. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Levis, L. R. 2013. *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Ledalero, Yogyakarta, Indonesia.
- Mardikanto, Totok dan Sutarni, Sri. 1993. *Petunjuk Penyuluhan Pertanian. Usaha Nasional*. Surabaya.
- . 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- . 2006. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Margono, Slamet. 2015. *Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Maulana, Aan. 2018. *Sistem Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (Tidak Dipublikasikan).
- Mayrowani, Henny. 2012. *Pembangunan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan Dan Implementasi*. *Jurnal Pusat Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*. Maret 2012.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muin, fatkhul. 2014. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol. 8 No. 1 Tahun 2014*.
- Narbuko dan Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta. Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia Group. Jakarta, Indonesia.
- Padmowihardjo, Soedijanto. 2002. *Evaluasi Penyuluhan Pertanian*. Universitas Terbuka. Jakarta.

- Pangerang *dalam* Ningsih. 2017. Fungsi dan Peran Penyuluh Pertanian. (<http://agronomi.pertanianblogspot.co.id> diakses pada 23 Maret 2019).
- Patton *dalam* Agusta. 2011. Metode Pengumpulan Data Dengan Wawancara. (<http://tithagalz.wordpress.com>. Jakarta. Diakses pada 22 Maret 2019).
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
-
- 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
-
- . 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
-
- . 91/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian.
-
- . 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani Dan Gabungan Kelompok tani.
-
- . 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Samsudin, U. 1997. Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian. Binacipta. Bandung.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah Dan Air Nusantara Milik Rakyat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Subagio, Bayu Dini. 2010. Tingkat Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian Di Desa Situ Udik Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, MP dan Smith, SC. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia. Jakarta: Erlangga.p
- Thomas, S. 2005. Program dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Universitas Terbuka.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Pemerintahan Daerah.

————— 33 Pasal 4, 5, Dan 6 Tentang Sumber Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

————— 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.

————— 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) .

————— 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Usman, Husaini dan Akbar, P.S. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Van Den Ban dan Hawskin. 1999. Penyuluh Pertanian. Kanisius. Yogyakarta, Indonesia.

Wibowo, R. 2016. Rekontruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 1983. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta.

Zakaria. 2006. Modul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Pusat Manajemen Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanian, Ciawi. Bogor.